



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS SEBELAS MARET

I. DATA PRIBADI

1. Nama : I GUSTI AYU KETUT RACHMI HANDAYANI
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 739799

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 9.260.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 332 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , WARISAN Rp. 3.060.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 292 m2/107 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 1.050.000.000
3. Tanah Seluas 120 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 113 m2/40 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 58 m2/58 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 1.060.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 455.000.000
8. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 555.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 5075 m2/200 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 1.900.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 123.500.000**

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2.5 MT JEEP Tahun 2011, WARISAN Rp. 120.000.000



2. MOTOR, HONDA AT11121B01 A/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI
Rp. 3.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.023.147.349
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	10.406.647.349
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	10.406.647.349

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.